

Sebab dan Akibat Terjadinya Inflasi Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Wahyuni Adha

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alya Annisa Salwa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ary Rizky Akbar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dr.Pani Akhiruddin Siregar,MA

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi penulis: wahyuniadha1@email.com , Alyaannisa2504@gmail.com,
aryrizkyakbar@gmail.com , paniakhiruddin@umsu.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sebab dan akibat terjadinya suatu inflasi serta dampak yang dapat ditimbulkannya dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kami menggunakan pendekatan analisis data sekunder untuk menjelaskan tentang bagaimana sebab dan akibat terjadinya inflasi, selain itu kami juga akan mengkaji dampak yang dapat ditimbulkan oleh inflasi bagi pertumbuhan ekonomi penduduk di Indonesia. Metode penelitian ini melibatkan analisis data statistik dan studi kasus untuk mendukung penelitian kami. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang terjadinya inflasi di Indonesia serta dapat mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkannya. Kesimpulan artikel ini akan memberikan rekomendasi kebijakan dan arahan penelitian lebih lanjut dalam menghadapi inflasi yang akan datang nantinya serta dapat menjadi landasan untuk mendukung pengembangan penelitian lanjutan lainnya.

Kata kunci: Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Ekonomi moneter.

LATAR BELAKANG

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus menerus dalam dalam priode tertentu. Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak menghendaknya. Milton Friedman mengatakan inflasi ada dimana saja dan selalu merupakan penomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan moneter yang berlebihan dan tidak stabil. Inflasi terjadi ketika

tingkat harga umum naik dan kenaikan harga ini bisa berdampak buruk pada kegiatan produksi karena ketika biaya produksi naik menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong produk nasional, investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun. Investasi lebih cenderung pada pembelian tanah, rumah, dan bangunan. Jika produksi barang menurun hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara yang ingin dicapai oleh setiap negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu setiap negara maju maupun negara yang sedang berkembang selalu berusaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasanya meningkat atau dengan kata lain terjadi perkembangan GNP potensial suatu negara.

Inflasi memberikan dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi bukan berarti inflasi itu harus diturunkan sampai nol persen, karena apabila laju inflasi nol itu juga tidak bisa memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi tetapi akan menimbulkan terjadinya stagnasi. Menurut data BPS tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2006 sebesar 6,60% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50%. Pada tahun 2007 inflasi Indonesia sebesar 6,59% dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 6,35%. Pada tahun 2008 inflasi Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi 11,06% dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 6,01%. Pada tahun 2009 inflasi Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 2,78% namun pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan menjadi 4,63%. Pada tahun 2010 inflasi Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi 6,96% namun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan juga yaitu menjadi 6,22%.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas inflasi memberikan dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatannya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi suatu negara. Ketika inflasi naik maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian awal pada tahun 2009 inflasi turun dan

pertumbuhan ekonomi juga turun. Pada tahun 2010 inflasi naik dan pertumbuhan ekonomi juga naik.

Terjadinya inflasi juga dapat melibatkan berbagai faktor kompleks, seperti peningkatan permintaan agregat yang berlebihan, kenaikan harga bahan baku, atau kebijakan moneter yang tidak sesuai. Peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku global atau kebijakan moneter yang tidak optimal dapat memberikan tekanan tambahan pada tingkat inflasi.

Akibat dari inflasi ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek ekonomi. Pertama-tama, daya beli masyarakat cenderung menurun karena harga barang dan jasa naik, menyebabkan konsumsi turun. Selain itu, para pelaku bisnis mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi, mengingat ketidakpastian harga. Penurunan investasi ini kemudian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dampak lainnya termasuk ketidakstabilan harga yang dapat merugikan pelaku bisnis kecil dan menengah, serta menciptakan ketidakpastian ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah juga dapat mengalami tekanan untuk menanggapi inflasi dengan kebijakan ekonomi yang tepat, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara lebih luas.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang sebab, akibat, dan dampak inflasi sangat penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Menurut teori neo klasik yang dipelopori oleh Roberts Solow menyatakan pertumbuhan produk nasional ditentukan oleh pertumbuhan dua jenis input yaitu pertumbuhan modal dan pertumbuhan tenaga kerja. Di samping faktor tenaga kerja dan modal, hal yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah faktor perkembangan teknologi.

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dari definisi tersebut ada tiga kriteria yang perlu diamati, untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan terjadi terus-menerus dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga satu barang yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga tidak

naik secara umum, kejadian seperti itu bukanlah inflasi. Kecuali bila yang naik itu seperti harga BBM, ini berpengaruh terhadap harga-harga lain sehingga secara umum semua produk hampir mengalami kenaikan harga. Bila kenaikan harga itu terjadinya sesaat kemudian turun lagi, itu pun belum bisa dikatakan inflasi, karena kenaikan harga yang diperhitungkan dalam konteks inflasi mempunyai rentang waktu minimal sebulan.

Inflasi juga disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat memiliki dampak atau akibat bagi pertumbuhan penduduk, oleh karena itu kami melakukan penelitian ini agar kami dan peneliti sebelumnya dapat mengetahui apa saja dampak yang akan terjadi pada diri kita juga pada pertumbuhan ekonomi mendatang agar kita dapat mengetahui hal hal apa saja yang dapat kita lakukan dan apa yang tidak.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yang melibatkan analisis data statistik dan studi kasus yang berkaitan dengan penelitian kami. Kami menggunakan pendekatan analisis data sekunder untuk menjelaskan tentang bagaimana sebab dan akibat terjadinya inflasi serta pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada penelitian kami juga mencari beberapa data atau informasi tentang sebab dan akibatnya serta dampak inflasi pada pertumbuhan penduduk dari beberapa web dan juga jurnal-jurnal peneliti terdahulu yang kami jadikan acuan utama dalam artikel ini. Yang mana nantinya bisa membimbing dan membantu kami dalam menyelesaikan penelitian tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebab dan Akibat Terjadinya Inflasi

Sebagaimana halnya yang umum terjadi pada negara – negara berkembang, inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat monetary policies. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari cost push inflation lebih besar dari pada demand pull inflation. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya oil booming, tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi hal tersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang

bersifat struktural ekonomi, sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sektor pertanian, yang dapat meningkatkan derajat inflasi. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter yang selanjutnya menjadi krisis ekonomi, inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor (imported inflation) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika.

Dalam menstabilkan nilai kurs, pemerintah Indonesia cenderung lebih banyak memainkan instrumen moneter melalui otoritas moneter dengan tight money policy. Tight money policy dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga SBI (melalui open market mechanism) sangat tinggi, pada satu sisi akan efektif untuk mengurangi money supply, tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bunga kredit untuk sektor riil. Akibatnya, akan menyebabkan timbulnya cost push inflation karena adanya interest rate-price spiral. Apabila tingkat suku bunga (deposito) perbankan sudah terlalu tinggi, sehingga dana produktif (dana untuk berproduksi atau berusaha) yang ada di masyarakat ikut terserap ke perbankan, maka akan dapat menyebabkan timbulnya stagnasi atau bahkan penurunan output produksi nasional (disebut dengan Cavallo effect). Lebih lagi bila sampai terjadi negatif spread pada dunia perbankan nasional, maka bukan saja menimbulkan kerusakan pada sektor riil, tetapi juga kerusakan pada industri perbankan nasional (sektor moneter). Jika kebijaksanaan ini terus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu menengah atau panjang, maka akan terjadi depresi ekonomi, akibatnya struktur perekonomian nasional akan rusak. Agar inflasi tidak terjadi terus menerus terdapat beberapa cara mengatasi Inflasi sehingga tidak merugikan secara umum, cara tersebut ada tiga secara garis besar yaitu

a) Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter dapat dilakukan melalui instrument diantaranya adalah:

- Politik Diskonto (discount policy) adalah politik bank sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang

yang beredar di masyarakat akan berkurang karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank daripada menjalankan investasi.

- Politik Pasar Terbuka (open market policy) dijalankan dengan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan menjual surat-surat berharga diharapkan uang akan tersedot dari masyarakat.
- Politik Persediaan Kas (cash ratio policy) adalah politik Bank Sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan dinaikkannya persentase persediaan kas, diharapkan jumlah kredit akan berkurang.

b) Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan financial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut ini:

(a) Pengaturan Pengeluaran Pemerintah (APBN), sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak akan menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.

(b) Menaikkan Pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak, dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

c) Kebijakan Nonmoneter (kebijakan riil)

Kebijakan ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

(a) Menaikkan Hasil Produksi.

(b) kebijakan Upah

(c) pengawasan harga.

Dampak Terjadinya Inflasi

Inflasi di Indonesia dapat berdampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat, tergantung tinggi rendahnya tingkat inflasi. Jika inflasi itu ringan, justru dapat berdampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

1. Dampak Bersifat Positif

a) Meningkatkan Pendapatan Nasional

Dengan meningkatnya tingkat inflasi, maka tingkat pendapatan dari pemerintah akan mengalami peningkatan terutama dari sektor perpajakan contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada saat terjadinya kenaikan harga dari barang dan jasa, maka kenaikan harga akan menambah jumlah pajak masukan PPN ke kas negara (Pemerintah)

b) Meningkatkan Niat Menabung Masyarakat

Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, serta buruh semakin swasta bergairah dalam bekerja dan melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Inflasi yang stabil membuat perencanaan keuangan masyarakat lebih baik, daya beli menjangkau, kebutuhan hidup terpenuhi, investasi lancar karena penanaman modal tidak bersifat spekulatif, kredit tidak macet. Jika dampak inflasi sering terjadi, dalam jangka panjang akan menyebabkan pendapatan riil akan lebih sejahtera. Bagi dunia usaha perdagangan, laporan keuangan perusahaan bernilai positif. Sementara, neraca keuangan negara tetap stabil

2. Dampak Bersifat Negatif

a) Pertumbuhan Ekonomi Lambat

Jika dampak dari inflasi itu parah dimana pada saat itu terjadi inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi), dapat menurunkan perekonomian masyarakat yang secara luas menjadi penyebab lesunya pertumbuhan ekonomi negara. Ditambah dengan kenaikan BBM, menjadikan harga-harga barang meningkat, daya beli masyarakat menurun, uang pensiun tidak cukup lagi, dunia usaha lesu karena bahan baku dan pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat akan dikurangi sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi karena dengan adanya subsidi dikurangi maka harga barang contohnya: Harga dari BBM akan mengalami kenaikan dan itu salah satu penyebab terjadinya inflasi, karena dengan adanya kenaikan harga BBM secara keseluruhan akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan jika terjadi dalam jangka waktu yang lama maka akan terjadi inflasi.

b) Menaikkan Tingkat Pajak (TAX)

Demikian halnya dengan kebijakan pemerintah dengan meningkatkan tingkat penerimaan penerimaan negara yang ditingkatkan dengan cara menaikkan tingkat pajak contohnya: Kenaikan tingkat PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dengan kenaikan PPN maka harga-harga dari kebutuhan sehari-hari akan mengalami kenaikan atau harga menjadi lebih mahal.

Sumber-sumber terjadinya Inflasi

Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menjadipenyebab timbulnya inflasi di Indonesia, yaitu :

Jumlah uang beredar:

Menurut sudut pandang kaum moneteris jumlah uang beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia jumlah uang beredar ini lebih banyak diterjemahkan dalam konsep narrow money (M1). Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan, bahwa uang kuasi hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan. Sejak tahun 1976 presentase uang kartal yang beredar (48,7%) lebih kecil daripada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%). Sehingga, mengindikasikan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Juga, mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia, dan semakin meluasnya monetisasi dalam kegiatan perekonomian subsistence, akibatnya memberikan kecenderungan meningkatnya laju inflasi. Menurut data yang dihimpun dalam Laporan Bank Dunia, menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di Indonesia pada periode tahun 1980-1992 relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan, tingkat inflasi Indonesia juga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (kecuali Filipina). Kenaikkan jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakan efek langsung dari kebijaksanaan Bank Indonesia dalam sektor keuangan (terutama dalam hal penurunan reserve requirement).

Defisit anggaran belanja pemerintah.

Seperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak kali disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran struktural ekonomi Indonesia yang acapkali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun. Selama pemerintahan Orde Lama defisit anggaran belanja ini acapkali dibiayai dari dalam negeri dengan cara melakukan pencetakan uang baru, mengingat orientasi kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang inward looking policy, sehingga menyebabkan tekanan inflasi yang hebat. Tetapi sejak era Orde Baru, defisit anggaran belanja ini ditutup dengan pinjaman luar negeri yang nampaknya relatif aman terhadap tekanan inflasi. Dalam era pemerintahan Orde Baru, kebutuhan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan sejak Pembangunan Jangka Panjang I, menyebabkan kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan sangat besar. Dengan mengingat bahwa potensi memobilisasi dana pembangunan dari masyarakat (baik dari sektor tabungan masyarakat maupun pendapatan pajak) di dalam negeri pada saat itu yang sangat terbatas (belum berkembang), juga kemampuan sektor swasta yang terbatas dalam melakukan pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan. Hal ini menyebabkan pos pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara

pengeluaran dan penerimaan negara, atau dapat dikatakan telah terjadi defisit struktural dalam keuangan negara.

Pada saat terjadinya oil booming, era tahun 1970-an, pendapatan pemerintah di sektor migas meningkat pesat, sehingga jumlah uang primer pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kemampuan pemerintah untuk berekspansi investasi di dalam negeri semakin meningkat. Dengan kondisi tingkat pertumbuhan produksi domestik yang relatif lebih lambat, akibat kapasitas produksi nasional yang masih berada dalam keadaan under-employment, peningkatan permintaan (investasi) pemerintah menyebabkan terjadi realokasi sumberdaya dari masyarakat ke pemerintah., seperti yang terkandung dalam analisis Keynes tentang inflasi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tekanan inflasi. Tetapi, sejak berubahnya orientasi ekspor Indonesia ke komoditi non migas, sejalan dengan merosotnya harga minyak bumi di pasar ekspor (sejak tahun 1982), menyebabkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional semakin berkurang pula, sehingga pemerintah tidak dapat lagi mempertahankan posisinya sebagai penggerak (motor) pembangunan. Dengan kondisi seperti ini, menyebabkan secara bertahap peran sebagai penggerak utama pembangunan nasional beralih ke pihak swasta nasional, dengan demikian sumber tekanan inflasi pun beralih dari pemerintah beralih ke non pemerintah (swasta). Tekanan inflasi pada periode ini lebih disebabkan oleh meningkatnya tingkat agresifitas sektor swasta dalam melakukan ekspansi usaha, yang didukung oleh perkembangan sektor perbankan yang semakin ekspansif pula. Dengan kondisi sumberdaya modal domestik yang masih saja relatif terbatas, maka pinjaman luar negeri yang sifatnya non komersial maupun komersial pun semakin meningkat. Akibatnya, tetap saja terjadi defisit anggaran belanja negara dan neraca pembayaran, salah satu sebabnya karena pemerintah tetap saja harus menyediakan infrastruktur dan suprastruktur pembangunan ekonomi yang kebutuhannya semakin meningkat. Peran pemerintah ini dapat dimaklumi karena kemampuan swasta nasional dalam pembangunan infrastruktur ekonomi masih sangat terbatas.

Pengendalian inflasi di Indonesia

Sebagaimana halnya yang umum terjadi pada negara – negara berkembang, inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat monetary policies. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari cost push inflation lebih besar dari pada demand pull inflation. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya oil booming, tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi hal tersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural ekonomi, sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sektor pertanian, yang dapat meningkatkan derajat inflasi.

Meningkatkan supply bahan pangan.

Meningkatkan supply bahan pangan dapat dilakukan dengan lebih memberikan perhatian pada pembangunan di sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian pangan. Modernisasi teknologi dan metode pengolahan lahan, serta penambahan luas lahan pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan laju produksi bahan pangan agar tercipta swasembada pangan.

Mengurangi Defisit APBN

Mungkin dalam masa krisis ekonomi mengurangi defisit APBN tidak dapat dilaksanakan, tetapi dalam jangka panjang (setelah krisis berlalu) perlu dilakukan. Untuk mengurangi defisit anggaran belanja, pemerintah harus dapat meningkatkan penerimaan rutinnya, terutama dari sektor pajak dengan benar dan tepat karena hal ini juga dapat menekan excess demand. Dengan semakin naiknya penerimaan dalam negeri, diharapkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pinjaman dana dari luar negeri. Dengan demikian anggaran belanja pemerintah nantinya akan lebih mencerminkan sifat yang relative independent.

Memperbaiki dan Meningkatkan Kemampuan Sisi Penawaran Agregat

Pertama, mengurangi kesenjangan output (output gap) dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya pekerja, modernisasi teknologi produksi, serta pembangunan industri manufaktur nasional agar kinerjanya meningkat. Kedua, memperlancar jalur distribusi barang nasional, supaya tidak terjadi kesenjangan penawaran dan permintaan di tingkat regional (daerah). Ketiga, menstabilkan tingkat suku bunga dan menyehatkan perbankan nasional, tujuannya untuk mendukung laju proses industrialisasi nasional. Keempat, menciptakan kondisi yang sehat dalam perekonomian agar market mechanism dapat berjalan dengan benar, dan mengurangi atau bahkan menghilangkan segala bentuk faktor yang dapat menyebabkan distorsi pasar. Kelima, melakukan program deregulasi dan debirokrasi di sektor riil karena acapkali birokrasi yang berbelit dapat menyebabkan high cost economy.

Dengan menggunakan dua pendekatan (moneterist dan strukturalist) pada komposisi yang tepat, maka diharapkan bukan saja dalam jangka pendek inflasi dapat dikendalikan, tetapi juga dalam jangka panjang. Dan, bila ada upaya yang serius untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang ada, maka akan berakibat pada membaiknya fundamental ekonomi Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masalah inflasi di Indonesia ternyata bukan saja merupakan fenomena jangka pendek, tetapi juga merupakan fenomena jangka panjang. Dalam arti, bahwa inflasi di Indonesia bukan semata-mata hanya disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan kebijaksanaan di sektor moneter oleh pemerintah, yang seringkali dilakukan untuk tujuan menstabilkan fluktuasi tingkat harga umum dalam jangka pendek, tetapi juga mengindikasikan masih adanya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Apabila mengacu pada usaha pengeliminasian hambatan-hambatan struktural tersebut, maka mau tidak mau harus memperhatikan dengan seksama pembangunan ekonomi di sektor riil. Dengan melakukan pembenahan di sektor riil secara tepat, bahkan mungkin sampai pada tahap meso dan mikro ekonomi, maka kemandirian fundamental ekonomi Indonesia dapat diperkokoh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih pada setiap orang-orang yang ikut serta dalam mendukung kami menyelesaikan penelitian ini. Serta pada dosen-dosen umsu yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan jurnal kami, dan tidak lupa pula pada Allah SWT yang memberi kami kesehatan serta keberkahan dalam mengerjakan penelitian tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Boediono (1997), Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No: 2 ; Ekonomi Makro, edisi keempat; Yogyakarta, BPFE.
- Cavanese, A. J., The Structuralist Explanation in the Theory of Inflation, *World Development*, No. 10 halaman 523-529.
- Dalal, M.N., Schacher, G. (July 1988), Transmission of International Inflation to India : A Structural Analysis, *The Journal of Developing Areas*, No. 23, halaman 85-104.
- Friedman, Milton (March 1984), The Role of Monetary Policy, *American Economic Review*, halaman 57-71. Fry, M.J., (Maret 1971), *Money and Capital or*

Financial Deepening in Economic Development ?, *Journal of Money, Credit and Banking*, No. 1, halaman 22-45.

Gunawan, Anton H. (Januari 1991), *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*, PAU-Ekonomi-UI, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Indrawati, Sri Mulyani (1996), *Sumber-Sumber Inflasi di Indonesia*, Makalah dalam Seminar ISEI dan PERHEPI, Jakarta.

Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Barro, Robert J. 2013. "Inflation and Economic Growth". *Journal Annals of Economics and Finance*. Vol. 14 (1): hal. 121-144.

Burhan, Bungin. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Indriyani, Siwi Nur. "Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2015". *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*. Vol. 4 (2): hal. 1-11.

Izzah, Nurul. 2015. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Riau Tahun 1994- 2013". *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 (2): hal. 156-172.

Jhingan. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Azulaidin, Azulaidin. (2021). PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 30–34. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10961>

Djuli Sjafei Purba, & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Tingkat Inflasi Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 1 –. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.115>

Fahrudin, Rifqi, & Sumitra, Irfan Dwiguna. (2020). PERAMALAN INFLASI MENGGUNAKAN METODE SARIMA DAN SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING (STUDI KASUS: KOTA BANDUNG). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(2), 111–120.

Jamine, Amelia. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kurniawati, Fitri. (2019). PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6(2).
<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>